

Edisi Perdana Agustus 2007

ISSN. 1978-6662

# Kybernologi

Jurnal Ilmu Pemerintahan Baru



## Ke Arah Visi Bangsa

**Taliziduhu Ndraha**  
Apakah Kybernologi Itu ?

**Muchlis Hamdi**  
Visi Bangsa Dan  
Anomie Pemerintahan

**Asri Harahap**  
Resolusi Konflik Pilkada Langsung

**Lery Rupidara**  
Visi 2030 Dan  
Pembaharuan Budaya

**Dadang Solihin**  
Visi Indonesia, Karakter Bangsa  
Dan Tantangan Ilmu Pemerintahan

**Profil**  
**Dr. H. Muh. Marwan**

**Yayasan Kybernologi Indonesia**

**Ringkasan Desertasi**  
**Dr. H. Muh. Marwan**

Diterbitkan oleh  
**Yayasan Kybernologi Indonesia**

## Visi Indonesia, Karakteristik Bangsa dan Tantangan Ilmu Pemerintahan

Oleh: Dadang Solihin, Drs., MA

*This paper tries to explain the vision of Indonesia as formulated in the Tap MPR VII/2001, Law Number 17/2007 and Indonesia Forum Foundation, especially the one connected to the challenges and the indicators of success. The effort to reach the vision should be done seriously, knowing that Indonesia is categorized as one of complicated rising countries. This is where the challenge should be answered by Kybernology, which is to stand up front to cope with the multi dimensional nation's problems.*

### Pendahuluan

Drs. Dadang Solihin, MA, Master of Arts, Department of Economics University of Colorado at Denver Amerika Serikat, Senior Planner BAP-PENAS, Coordinator the National Policy Support Team for Good Governance. Sementara menempuh Program Doktor Ilmu Pemerintahan di UNPAD.

**V**isi adalah gambaran keadaan masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi tersebut merupakan sumber inspirasi, motivasi, dan kreativitas yang mengarahkan proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang dicita-citakan. Visi bangsa Indonesia sudah jelas dicantumkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "... memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..." Dan sudah jelas pula bahwa kewajiban kita semua untuk mewujudkannya. Yang belum jelas adalah kapan cita-cita itu akan terwujud.

Lain halnya dengan pernyataan visi dalam Pembukaan UUD 1945 yang tidak mencantumkan kapan visi itu akan terwujud, dokumen-dokumen berikut sudah memuat kurun waktu pencapaiannya, yaitu: 1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan; 2) UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, dan 3) Visi 2030 Yayasan Indonesia Forum.

Dengan tidak mengurangi penghargaan tentang dokumen mana yang paling realistis, paling tidak untuk 20 tahun ke depan Indonesia sudah mempunyai gambaran tentang wujud masa depan yang diharapkan atas dasar perkiraan-perkiraan berdasarkan pengetahuan yang ada sekarang. Adapun *vision statement* dari ketiga dokumen tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

**Tabel 1**  
**Visi Indonesia**

<b>Visi 2020 Tap MPR VII/2001</b>	<b>Visi 2025 RPJP - UU 17/2007</b>	<b>Visi 2030 Yayasan Indonesia Forum</b>
Terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, dengan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih.	Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.	Indonesia sejajar dengan negara-negara besar dunia, dihuni oleh masyarakat yang sejahtera, dengan kemajuan ekonomi yang dinikmati merata oleh setiap warga negara Indonesia.

Visi harus disiapkan untuk menjawab tantangan masa depan yang makin bergejolak dan mengandung ketidakpastian. Di satu sisi, yaitu tantangan dari dalam, perjalanan bangsa ini serta kehidupan masyarakatnya makin dipenuhi oleh krisis nilai-nilai, mulai dari kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah sampai pada ketidakpedulian sosial yang akut.

Di sisi lain, tantangan dari luar, liberalisasi perdagangan dan investasi yang dibarengi dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi antar bangsa menuntut antisipasi yang cepat oleh setiap negara agar mampu bersaing dengan negara lain dalam bidang tersebut, baik dalam forum regional maupun internasional. Sementara itu, perwujudan era perdagangan bebas global (*globally free trade*), pada satu sisi, telah menjadi obsesi bagi sebagian negara, terutama negara-negara industri/maju. Sebaliknya, bagi negara-negara yang keadaan ekonominya lemah, termasuk Indonesia, perdagangan bebas menjadi ancaman yang serius yang dapat semakin melemahkan keadaan dan kemampuan ekonominya.

Di sinilah posisi pentingnya ilmu pemerintahan dalam menata strategi pembangunan. Pemerintah adalah alat atau sarana untuk mencapai tujuan negara (visi). Dalam negara yang tujuannya berpijak pada paham kedaulatan rakyat, maka pemerintahannya cenderung akan berlangsung dengan cara-cara yang demokratis untuk meningkatkan harkat dan martabat rakyat yang berdaulat. Sejalan dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaulat, pemerintahan suatu negara secara terus menerus akan melakukan kegiatan-kegiatan perubahan ke arah yang lebih baik.

## **Visi Indonesia**

### **a. Tap MPR VII/2001**

Sebagaimana dijelaskan pada pendahuluan tulisan ini, Visi Indonesia 2020 menurut Tap MPR VII/2001 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.

Dalam mewujudkan Visi Indonesia 2020, bangsa dan negara menghadapi tantangan keadaan dan perubahan saat ini dan masa depan, baik dari dalam maupun luar negeri.

*Pertama*, pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan negara. Menurut Tap MPR VII/2001, kemajemukan suku, ras, agama, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus diterima dan dihormati. Pengelolaan kemajemukan bangsa secara baik merupakan

tantangan dalam mempertahankan integrasi dan integritas bangsa. Penyebaran penduduk yang tidak merata dan pengelolaan otonomi daerah yang menggunakan konsep negara kepulauan sesuai dengan Wawasan Nusantara merupakan tantangan pembangunan daerah dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, pengaruh globalisasi juga merupakan tantangan bagi pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan negara.

*Kedua*, sistem hukum yang adil. Semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan berhak mendapatkan keadilan. Hukum ditegakkan untuk keadilan dan bukan untuk kepentingan kekuasaan ataupun kelompok kepentingan tertentu. Tantangan untuk menegakkan keadilan adalah terwujudnya aturan hukum yang adil serta institusi hukum dan aparat penegak hukum yang jujur, profesional, dan tidak terpengaruh oleh penguasa. Supremasi hukum ditegakkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan pembelaan hak asasi manusia.

*Ketiga*, sistem politik yang demokratis. Tantangan sistem politik yang demokratis adalah terwujudnya kedaulatan di tangan rakyat, partisipasi rakyat yang tinggi dalam kehidupan politik, partai politik yang aspiratif dan efektif, pemilihan umum yang berkualitas. Sistem politik yang demokratis ditopang oleh budaya politik yang sehat, yaitu sportivitas, menghargai perbedaan, santun dalam perilaku, mengutamakan kedamaian, dan antikekerasan dalam berbagai bentuk. Semua itu diharapkan melahirkan kepemimpinan nasional yang demokratis, kuat, dan efektif.

*Keempat*, sistem ekonomi yang adil dan produktif. Tantangan sistem ekonomi yang adil dan produktif adalah terwujudnya ekonomi yang berpihak pada rakyat serta terjaminnya sistem insentif ekonomi yang adil, dan mandiri. Sistem ekonomi tersebut berbasis pada kegiatan rakyat, yang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkesinambungan, terutama yang bersumber dari pertanian, kehutanan, dan kelautan. Untuk merealisasikan sistem ekonomi tersebut diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan mekanisme ekonomi yang menyerap tenaga kerja. Di samping itu, negara mengembangkan ekonomi dengan mengolah sumber daya alam dan industri lainnya, termasuk industri jasa.

*Kelima*, sistem sosial budaya yang beradab. Tantangan terwujudnya sistem sosial yang beradab adalah terpelihara dan teraktualisasinya nilai-nilai universal yang diajarkan setiap agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga terwujud kebebasan untuk berekspresi dalam rangka pencerahan, penghayatan, dan pengamalan agama serta keragaman budaya. Sistem sosial yang beradab mengutamakan terwujudnya masyarakat yang mempunyai rasa saling percaya dan saling menyayangi, baik terhadap sesama masyarakat maupun antara masyarakat dengan institusi publik. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat mencakup peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan rakyat, rasa aman, dan unsur-unsur kesejahteraan rakyat lainnya.

*Keenam*, sumber daya manusia yang bermutu. Tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia yang bermutu adalah terwujudnya sistem pendidikan yang berkualitas yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang andal dan berakhlak mulia, yang mampu bekerja sama dan bersaing di era globalisasi dengan tetap mencintai tanah air. Sumber daya manusia yang bermutu tersebut memiliki keimanan dan ketakwaan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja, dan mampu membangun budaya kerja yang produktif dan berkepribadian.

*Ketujuh*, globalisasi. Tantangan menghadapi globalisasi adalah mempertahankan eksistensi dan integritas bangsa dan negara serta memanfaatkan peluang untuk kemajuan bangsa dan negara. Untuk menghadapi globalisasi diperlukan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan, baik di sektor negara maupun di sektor swasta.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan Visi Indonesia 2020 dipergunakan indikator-indikator utama sebagaimana Boks 1 berikut :

**Boks 1: Indikator Tingkat Keberhasilan Perwujudan Visi Indonesia 2020 berdasarkan Tap MPR VII/2001**

Indikator	Keterangan
1. Religius	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa sehingga nilai dan norma agama dilaksanakan dalam perilaku keseharian.</li> <li>▪ Terwujudnya toleransi antar dan antara umat beragama.</li> </ul>
2. Bersatu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya semangat persatuan dan kerukunan bangsa.</li> <li>▪ Meningkatnya toleransi, kepedulian, dan tanggung jawab sosial.</li> <li>▪ Berkembangnya budaya dan perilaku sportif serta menghargai dan menerima perbedaan.</li> <li>▪ Berkembangnya semangat antikekerasan.</li> <li>▪ Berkembangnya dialog secara wajar dan saling menghormati antarkelompok dalam masyarakat.</li> </ul>
3. Demokratis	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terwujudnya keseimbangan kekuasaan antara lembaga penyelenggara negara dan hubungan kekuasaan antara pemerintahan nasional dan daerah.</li> <li>▪ Menguatnya partisipasi politik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum berkualitas, efektifnya partai politik dan kontrol sosial yang semakin meluas.</li> <li>▪ Berkembangnya negara sosial dan politik yang bersifat terbuka.</li> <li>▪ Terwujudnya mekanisme kontrol di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</li> <li>▪ Berkembangnya budaya demokrasi: transparansi, akuntabilitas, jujur, sportif, dan menghargai perbedaan.</li> <li>▪ Berkembangnya sistem kepemimpinan yang egaliter dan rasional.</li> </ul>
4. Adil	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tegaknya hukum yang berkeadilan tanpa diskriminasi;</li> <li>▪ Terwujudnya institusi dan aparat hukum yang bersih dan profesional;</li> <li>▪ Terwujudnya penegakan hak asasi manusia;</li> <li>▪ Terwujudnya budaya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum;</li> <li>▪ Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan, sumberdaya ekonomi dan penguasaan aset ekonomi, serta hilangnya praktek monopoli;</li> <li>▪ Tersedianya peluang yang lebih besar bagi kelompok ekonomi kecil, penduduk miskin dan tertinggal.</li> </ul>
5. Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya pendapatan per penduduk sehingga bangsa Indonesia menjadi sejahtera dan mandiri.</li> <li>▪ Meningkatnya angka partisipasi murni anak usia sekolah SLTA.</li> <li>▪ Meningkatnya indeks pengembangan manusia, yang merupakan</li> </ul>

Indikator	Keterangan
	<p>komposisi tingkat pendidikan, kesehatan, angka kematian bayi, dan usia harapan hidup.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terpenuhinya sistem pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui asuransi kesehatan.</li> <li>▪ Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil, merata, ramah lingkungan dan berkelanjutan.</li> <li>▪ Terwujudnya keamanan dan rasa aman dalam masyarakat.</li> </ul>
6. Maju	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya kemampuan bangsa dalam pergaulan antarbangsa.</li> <li>▪ Meningkatnya kualitas SDM sehingga mampu bekerjasama dan bersaing dalam era global.</li> <li>▪ Meningkatnya kualitas pendidikan sehingga menghasilkan tenaga yang kompeten sesuai dengan standar nasional dan internasional.</li> <li>▪ Meningkatnya disiplin dan etos kerja.</li> <li>▪ Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi serta kebudayaannya dalam masyarakat.</li> <li>▪ Teraktualisasikannya keragaman budaya Indonesia.</li> <li>▪ Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Bersih</li> <li>▪ Terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN.</li> <li>▪ Terbentuknya penyelenggara negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat.</li> <li>▪ Berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan pemerintahan.</li> </ul>

#### b. RPJP - UU No. 17/2007

Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 sesuai dengan UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah: Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.

Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi pembangunan nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai. Berikut adalah penjelasan lebih rinci dari UU No. 17/2007 mengenai kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran.

*Pertama*, kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya. Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian. Kemandirian bukanlah kemandirian dalam keterisolasian. Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun bangsa. Terlebih lagi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas ketergantungan antarbangsa semakin kuat. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.

Selanjutnya menurut RPJPN, bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian.

Kemandirian suatu bangsa tercermin, antara lain, pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparat pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh sehingga ketergantungan kepada sumber dari luar negeri menjadi kecil; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok. Apabila karena sumber daya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan lain sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi dunia.

Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.

*Kedua*, tingkat kemajuan suatu bangsa dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan suatu negara diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduknya ditandai oleh makin menurunnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan.

Kemajuan suatu bangsa juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kesehatan. Bangsa yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.

Menurut RPJPN, apabila ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya. Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian ekonomi suatu bangsa menjadikan bangsa tersebut lebih makmur dan lebih maju. Negara yang maju pada umumnya adalah negara yang sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dalam segi penghasilan, sumbangan dalam penciptaan pendapatan nasional maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, dalam proses produksi berkembang keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa; serta pemanfaatan sumber alam yang bukan hanya ada pada pemanfaatan ruang daratan, tetapi juga ditransformasikan kepada pemanfaatan ruang kelautan secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi. Negara yang maju umumnya adalah negara yang perekonomiannya stabil. Gejolak yang berasal dari dalam maupun luar negeri dapat diredam oleh ketahanan ekonominya.

Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, bangsa yang maju juga telah memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap. Lembaga politik dan kemasyarakatan telah berfungsi berdasarkan aturan dasar, yaitu

konstitusi yang ditetapkan oleh rakyatnya. Bangsa yang maju juga ditandai oleh adanya peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Dalam aspek politik, sejarah menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kemajuan suatu bangsa dan sistem politik yang dianutnya. Bangsa yang maju pada umumnya menganut sistem demokrasi, yang sesuai dengan budaya dan latar belakang sejarahnya. Bangsa yang maju adalah bangsa yang hak-hak warganya, keamanannya, dan ketenteramannya terjamin dalam kehidupannya. Selain unsur-unsur tersebut, bangsa yang maju juga harus didukung dengan infrastruktur yang maju.

Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak hanya dicerminkan oleh perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas. Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial.

*Ketiga*, pembangunan bangsa Indonesia bukan hanya sebagai bangsa yang mandiri dan maju, melainkan juga bangsa yang adil dan makmur. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, rakyat mempunyai hak, baik dalam merencanakan, melaksanakan, maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilan merupakan ciri yang menonjol pula dalam pembangunan nasional.

Keadilan dan kemakmuran harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan mempertahankan negara; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Dengan demikian, bangsa adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

Untuk mengukur tercapainya Visi Indonesia 2025 dipergunakan indikator-indikator utama sebagaimana Boks 2 berikut :

#### **Boks 2: Indikator Tercapainya Visi Indonesia 2025 RPJP - UU 17/2007**

<b>Indikator</b>	<b>Sasaran Pokok</b>
1. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab	1. Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek. 2. Makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia Indonesia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa.
2. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat	1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara

Indikator	Sasaran Pokok
yang lebih makmur dan sejahtera	<p>dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.</li> <li>3. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.</li> <li>4. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.</li> <li>5. Meningkatnya profesionalisme aparaturnya negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.</li> </ol>
3. Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.</li> <li>2. Menciptakan landasan konstitusional untuk memperkuat kelembagaan demokrasi.</li> <li>3. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik.</li> <li>4. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non-</li> </ol>

Indikator	Sasaran Pokok
	<p>diskriminasi, dan kemitraan.</p> <p>5. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang professional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian nasional.</p>
<p>4. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri</p>	<p>1. Terwujudnya keamanan nasional yang menjamin martabat kemanusiaan, keselamatan warga negara, dan keutuhan wilayah dari ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.</p> <p>2. TNI yang profesional, komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang kuat terutama bela negara masyarakat dengan dukungan industri pertahanan yang andal.</p> <p>3. Polri yang profesional, partisipasi kuat masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang efektif, serta mantapnya koordinasi antara institusi pertahanan dan keamanan.</p>
<p>5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan</p>	<p>1. Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>2. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.</p> <p>3. Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.</p> <p>4. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.</p>
<p>6. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari</p>	<p>1. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.</p> <p>2. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.</p> <p>3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku</p>

Indikator	Sasaran Pokok
	masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
7. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia.</li> <li>2. Meningkatkan dan menguatnya sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-hal yang terkait dalam kerangka pertahanan negara.</li> <li>4. Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.</li> <li>5. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.</li> </ol>
8. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat dan mempromosikan identitas nasional sebagai negara demokratis dalam tatanan masyarakat internasional.</li> <li>2. Memulihkan posisi penting Indonesia sebagai negara demokratis besar yang ditandai oleh keberhasilan diplomasi di fora internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional.</li> <li>3. Meningkatkan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan damai.</li> <li>4. Terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi global.</li> <li>5. Meningkatnya investasi perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri.</li> </ol>

### c. Visi Indonesia 2030

Perumusan Visi oleh masyarakat luas seperti yang dilakukan oleh Yayasan Indonesia Forum merupakan langkah yang patut dihargai, karena keterlibatan masyarakat sebagai salah satu bagian dari *stakeholders* bangsa akan memperkokoh bangsa itu sendiri.

Visi Indonesia 2030 yang disusun oleh Yayasan Indonesia Forum ditopang oleh empat pencapaian utama, yaitu: 1) Pengelolaan kekayaan alam yang berkelanjutan, 2) Mendorong Indonesia supaya masuk dalam 5 besar kekuatan ekonomi dunia dengan pendapatan perkapita sebesar 18 ribu dolar AS/tahun, 3) Perwujudan kualitas hidup modern yang merata, serta 4) Mengantarkan sedikitnya 30 perusahaan Indonesia dalam daftar Fortune 500 Companies.

## Pencapaian Visi dan Karakteristik Bangsa

Arsitektur baru bagi sistem administrasi pemerintah Indonesia dengan mengakomodasikan tuntutan tegaknya pemerintahan yang demokratis, mengindahkan supremasi hukum, bersih, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab adalah bukti keberhasilan gerakan reformasi nasional yang bangkit pada tahun 1998 sebagai koreksi atas sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan Orde Baru. Tuntutan ini selanjutnya berhasil dituangkan dalam empat kali amandemen konstitusi yang berlangsung dalam kurun waktu 1999-2002.

Sementara itu, di tataran eksternal seiring dengan derasnya globalisasi dan liberalisasi perekonomian, berkembang tuntutan demokratisasi politik dan ekonomi pada setiap negara bangsa di berbagai belahan dunia. Globalisasi atau proses transformasi global yang sekarang sedang berlangsung dalam kehidupan umat manusia menyangkut seluruh aspek kehidupan, yakni politik, kebudayaan, dan ekonomi. Satu sama lain, aspek-aspek itu saling mempengaruhi.

Globalisasi ekonomi, mendorong transformasi dalam sistem administrasi publik. Di beberapa negara hal itu ditandai dengan penerapan "*reinventing government*", "*banishing bureaucracy*", dan perwujudan "*good governance*", sebagai bagian dari strategi untuk mendorong revitalisasi perekonomian, peningkatan mutu dan efisiensi pelayanan, tegaknya tatakelola pemerintahan yang baik, dan terwujudnya pemerintahan yang bersih.

Memang banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk membangun dalam rangka mencapai visinya, baik yang bersumber dari momentum pembangunannya sendiri, dari keberhasilan gerakan reformasi nasional, dari potensi nasional yang dapat dikembangkan, maupun dari peluang-peluang yang terbuka dari perkembangan lingkungan regional dan internasional. Namun kenyataan membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah hampir 10 tahun belum juga berhasil keluar dari jeratan krisis multi dimensi. Apakah karena kita tidak bisa memanfaatkan berbagai peluang tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis mencoba untuk menggali beberapa pemikiran yang menyatakan bahwa beberapa negara yang sulit untuk maju ternyata memiliki beberapa kemiripan struktur serta karakteristik, yaitu:

1. Yang pernah menjadi negara jajahan bangsa lain (*Taylor dan Hudson, 1972, Bertocchi, 1996, Mauro 1997, Todaro, 2002*).  
*"The European colonial powers had a dramatic and long-lasting impact on the economies and political institutional structures of their African and Asian colonies..."*
2. Yang memiliki Sumber Daya Alam melimpah (*Sachs dan Warner, 2001, Hodler, 2004*)  
*"The curse of natural resources: countries with great natural resource wealth tend nevertheless to grow more slowly than resource-poor countries. Resource-abundant countries tended to be high-price economies and, perhaps as a consequence, these countries tended to miss-out on export-led growth"*.
3. Yang memiliki banyak etnis (*Shleifer dan Vishny 1993, Mauro 1994, Todaro, 2002*).  
*"Clearly, the greater the ethnic and religious diversity of a country, the more likely it is that there will be internal strife and political instability."*
4. Yang tengah mengalami masa transisi dari pemerintah otoriter kepada demokrasi dan ekonomi pasar (*Patrick Glynn, Stephen J. Kobrin, dan Moises Naim, 1999*).
5. Yang berlokasi di sekitar garis Katulistiwa (*Todaro, 2002*).  
*"Almost all developing countries are situated in tropical or subtropical climatic zones. It has been observed that the economically most successful countries are located in the temperate zone."*

Kelima karakteristik itu merupakan sesuatu yang sudah melekat dan tidak dapat dihindari lagi. Dalam konteks Indonesia, apabila negeri ini masih tetap tidak serius dalam berbenah diri, bukannya visi yang akan dicapai, tetapi malah negeri ini akan lebih terperosok ke dalam berbagai krisis yang berlaut-larut. Untuk itulah ilmu pemerintahan harus berdiri di depan dalam turut menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa ini.

### **Penutup: Tantangan bagi ilmu pemerintahan**

Setinggi apapun cita-cita yang termuat dalam visi bangsa, akan sulit untuk mencapainya tanpa administrasi pemerintah yang menunjangnya. Bahkan proses pembangunan di negara manapun, sangat dipengaruhi oleh kinerja administrasi pemerintahnya. Berbagai studi menunjukkan bahwa pembangunan tidak berjalan sebagaimana seharusnya karena birokrasi menghambat dan tidak menunjang pembangunan. Birokrasi adalah suatu kebutuhan yang tak dapat dihindari. Persoalannya adalah bagaimana membangun birokrasi agar semakin sesuai dengan tuntutan jaman (termasuk tuntutan era globalisasi) dan perkembangan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, visi tadi hanya bisa terwujud apabila didukung oleh administrasi pemerintah yang memadai untuk membuat segala potensi yang dimiliki bangsa bergerak menuju ke arah itu. Ini menjadi tantangan bagi kita dan memerlukan pemikiran yang mendalam.

Untuk menjawab tantangan tersebut, ada beberapa hal yang harus dipecahkan. *Pertama*, bagaimana memenuhi kebutuhan suatu masyarakat modern, yang menuntut pemerintahan yang modern. Banyak pengalaman empiris dan literatur yang dapat digunakan sebagai rujukan mengenai sosok pemerintahan modern dan harus kita upayakan untuk menerapkannya ke dalam pemerintahan Indonesia. Modern tidak berarti semata-mata peralatannya yang modern, tetapi sikap dan budaya serta nilai-nilai yang menyemangatnya modern.

*Kedua*, menjadikan birokrat di pusat dan daerah sebagai fasilitator bagi dunia bisnis, sebab berbagai kajian merekomendasikan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan ekspor, bukan konsumsi.

*Ketiga*, aparaturnya haruslah diisi oleh orang-orang yang profesional, yakni yang berkarakter, mempunyai kemampuan dalam suatu bidang yang ditekuninya dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kerjanya. Oleh karena itu, *transparency* dan *accountability* merupakan unsur penting dalam sistem aparaturnya yang modern, yang dilandasi oleh derajat rasionalitas yang tinggi. Nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan harus menjawai aparaturnya yang demikian. Hanya dengan memiliki sifat-sifat itu aparaturnya dapat membangkitkan rasa hormat dan berwibawa.

*Keempat*, aparaturnya haruslah tanggap terhadap kebutuhan, aspirasi, dan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat yang dilayaninya. Ia juga harus peka kepada perubahan. Karena kehidupan masyarakat bersifat sangat dinamis dan perubahannya terjadi dengan frekuensi yang makin cepat, didorong oleh cepatnya meningkat keinginan untuk hidup lebih baik, dan perkembangan teknologi. Aparaturnya bahkan bukan hanya peka terhadap angin perubahan, tetapi harus memeloporinya dan mengarahkannya ke arah perbaikan.

*Kelima*, peran individu dan masyarakat dalam kehidupan modern akan makin besar, sehingga aparaturnya harus dapat menempatkan fungsinya secara tepat agar berjalan seiring dan saling menunjang dengan peran masyarakat yang makin besar itu.

*Keenam*, dunia yang makin menyatu menyebabkan makin kaburnya batas-batas negara, bahkan beberapa pakar mengatakan batas-batas kedaulatan. Kehidupan manusia yang mengglobal, menjadikan makin rumitnya masalah-masalah yang dihadapi dan

karenanya menjadi tantangan pula bagi aparaturnya pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan (*policies*).

*Ketujuh*, perwujudan etika pemerintahan makin menuntut pemerintah untuk berbuat baik, menjadi sumber motivasi untuk selalu berbuat sesuai dengan peraturan atau kelaziman yang berlaku demi kepentingan umum, dan menjadi penyaring dari keinginan untuk menggunakan kewenangan yang bersifat menyimpang dari peraturan atau kelaziman umum yang berlaku.

*Kedelapan*, makin dituntut adanya hubungan yang sinergis dan ekologis antara pemerintahan dan lingkungannya dalam suatu proses saling mempengaruhi yang dinamis.

### Daftar Pustaka

- Bappenas (2001), "Visi Indonesia 2020", Direktorat Neraca Pembayaran dan Kerjasama Ekonomi Internasional
- Bertocchi, Graziella (1996), "Did Colonialization Matter for Growth? An Empirical Exploration into the Historical Causes of Africa's Underdeveloped", Dipartimento di Economia Politica, Universita' di Modena, Italy
- Hodler, Roland (2004). "The Curse of Natural Resources in Fractionalized Countries, Universität Bern Volkswirtschaftliches Institut, Switzerland
- Kartasmita, Ginandjar (1997), "Visi Pembangunan dalam PJP II, Gambaran Masyarakat Indonesia Tahun 2018 dan Tantangannya Bagi Aparatur Negara," Seminar Pendayagunaan Aparatur Negara, Jakarta, 7 Juli
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan
- Kompas (2007), "Visi Pembangunan Indonesia Menuju 2030", 16 Juli
- Mauro, Paulo (1995) "Corruption and Growth," *Quarterly Journal of Economics*, August 1995, 681-712
- Sachs, Jeffrey D and Andrew M. Warner (2001), "The curse of natural resources, Center for International Development, Harvard University
- Shleifer, Andrei and Robert W. Vishny (1993) "Corruption," *Quarterly Journal of Economics*, 599-617
- Todaro, Michael P (2002), "Economic Development," 7th Edition, Addison-Wesley, New York